Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2025, 11 (10.D), 210-218
DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11759
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Upaya Meningkatkan Kemandirian Belajar Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Media Kartu Pembelajaran

Ike Kurnia, Sukainah, Rani Mega Putri

Universitas Sriwijaya

Received: 05 September 2025
Revised: 17 September 2025
Accepted: 28 September 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar secara mandiri melalui layanan bimbingan kelompok dengan media kartu pembelajaran kelas X.10 di SMA Negeri 10 Palembang. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian tindakan bimbingan konseling atau PTBK. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan pada pra siklus tingkat pemahaman kemandirian belajar peserta didik dalam kategori rendah presentase 100%, siklus I tingkat pemahaman kemandirian belajar peserta didik dalam kategori rendah presentase 62,5%, dalam kategori sedang 37.5% , dalam kategori tinggi presentase 0%. Kemudian pada siklus ke II mengalami penaikan akan pemahaman kemandirian belajar peserta didik yang dalam ketegori rendah presentase 0%, kategori sedang 75% dan kategori tinggi dengan presentase 25%. Peningkatan nilai yang terjadi di pra siklus, siklus I dan siklus II menunjukkan bahwa permainan kartu pembelajaran terbukti berhasil dalam meningkatkan kemandirian belajar peserta didik melalui penerapan layanan bimbingan kelompok.

Kata Kunci: *Kemandirian belajar; bimbingan kelompok; kartu pembelajaran*

(*) Corresponding Author: ikekurniaaa@gmail.com

How to Cite: Kurnia, I., Sukainah, S., & Putri, R. (2025). Upaya Meningkatkan Kemandirian Belajar Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Media Kartu Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(10.D), 210-218. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11759

PENDAHULUAN

Myanmar adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan China (Simangungsong, 2024). Sebagai mitra dagang terbesar Myanmar, China telah berinvestasi dalam berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, dan infrastruktur (Htut, 2024). Salah satu proyek utama dalam kerja sama bilateral ini adalah China-Myanmar Economic Corridor (CMEC), yang diumumkan secara resmi pada 2017 sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) (Kobayashi & King, 2022). CMEC bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara Yunnan, China, dan pelabuhan Kyaukpyu di Myanmar, yang memberikan akses strategis bagi China ke Samudra Hindia.

Sebelum kudeta 1 Februari 2021, China sudah lama menjalin hubungan dekat dengan pemerintahan sipil Myanmar yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di bawah Aung San Suu Kyi (BBC News Indonesia, 2021). Pada Januari 2020, Presiden China Xi Jinping mengunjungi Myanmar dan menandatangani 33 perjanjian kerja sama ekonomi, termasuk proyek infrastruktur besar dalam CMEC (VOA Indonesia, 2020). Kunjungan ini adalah yang pertama bagi seorang pemimpin China dalam hampir 20 tahun, menandakan meningkatnya kepentingan di Myanmar dalam strategi ekonomi dan geopolitik Beijing.

Gambar 1. Penandatangan nota kesepahaman

Sumber :

https://www.voaindonesia.com/a/china-myanmar-sepakati-puluhan-perjanjian-infrastruktur-/5251378.html

Namun, setelah kudeta yang dilakukan oleh Tatmadaw (angkatan bersenjata Myanmar) terhadap pemerintahan NLD, hubungan ekonomi China-Myanmar menjadi lebih kompleks. Pemerintahan militer menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok pro-demokrasi serta kelompok etnis bersenjata, yang telah lama berkonflik dengan pemerintah pusat. Konflik ini menyebabkan gangguan terhadap proyek-proyek investasi China, beberapa di antaranya menjadi sasaran serangan (Bicker, 2024).

Pada Maret 2021, hanya beberapa minggu setelah kudeta, lebih dari 30 pabrik milik China di Zona Industri Hlaing Tharyar, Yangon, dibakar oleh kelompok yang diduga anti-junta. Insiden ini menyebabkan kerugian lebih dari $37 juta dan meningkatkan sentimen anti-China di Myanmar (Erina, 2021). Banyak warga Myanmar menuduh China mendukung junta militer secara diam-diam, terutama melalui veto dalam Dewan Keamanan PBB yang menghambat resolusi terhadap junta.

Di sisi lain, China terus menjalin hubungan dengan militer Myanmar untuk melindungi investasinya (Myers, 2024). Pada 26 Desember 2023, rezim militer Myanmar yang tergabung dalam Dewan Administrasi Negara (SAC) menandatangani adendum perjanjian konsesi dengan Tiongkok terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kyaukphyu beserta pelabuhan laut dalamnya. Infrastruktur ini menjadi bagian penting dari proyek ambisius CMEC, yang secara strategis dirancang untuk memberikan akses laut yang lebih cepat bagi provinsi-provinsi barat Tiongkok yang tidak memiliki garis pantai, dengan menghubungkannya langsung ke Teluk Benggala (Sin, 2024). Proyek ini dinilai strategis bagi China karena memungkinkan pengiriman minyak dan gas langsung dari Myanmar ke China, tanpa harus melewati Selat Malaka yang lebih rentan terhadap tekanan geopolitik.

Selain faktor ekonomi, keterlibatan China juga memiliki dimensi geopolitik yang lebih luas. Myanmar merupakan bagian penting dalam strategi regional China, terutama dalam mengurangi ketergantungan Beijing pada Selat Malaka sebagai jalur utama perdagangan dan energi. Dengan mengamankan akses langsung ke Samudra Hindia melalui pelabuhan Kyaukpyu, China dapat memperkuat posisinya di kawasan dan mengurangi risiko yang timbul dari ketegangan geopolitik di Laut China Selatan

Ramachandran (2023) menyatakan bahwa, meskipun China secara resmi menyatakan sikap netral, hubungan pragmatisnya dengan junta militer menimbulkan kecurigaan di kalangan oposisi Myanmar. Kedutaan Besar Tiongkok di Myanmar menjadi sorotan demonstran yang mengecam sikap Tiongkok yang dinilai tidak tegas terhadap kudeta, kedekatannya dengan rezim SAC, serta narasi media pemerintah Tiongkok yang menyebut kudeta sebagai "reshuffle kabinet". Walaupun Tiongkok menyatakan dukungan terhadap Konsensus Lima Poin ASEAN terkait Myanmar, hubungan yang terus terjalin dengan SAC

justru memicu meningkatnya sentimen anti-Tiongkok di kalangan aktivis dan kelompok pro-demokrasi.

Namun, ambisi geopolitik China di Myanmar menghadapi tantangan besar akibat ketidakstabilan domestik yang berkepanjangan. Konflik yang melibatkan berbagai kelompok etnis bersenjata, pemerintahan bayangan National Unity Government (NUG), serta pasukan pro junta menciptakan situasi yang sangat kompleks. China harus menavigasi hubungan dengan berbagai aktor, baik yang pro maupun anti-junta, untuk memastikan kepentingan ekonominya tetap terlindungi tanpa secara langsung terlibat dalam konflik.

Sementara itu, hubungan ekonomi China-Myanmar juga menghadapi tantangan baru akibat sanksi tambahan dari negara-negara Barat terhadap junta Myanmar. Pada April 2024, Amerika Serikat dan Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap beberapa bank dan perusahaan yang berafiliasi dengan Tatmadaw, termasuk beberapa entitas yang memiliki keterkaitan dengan investasi China di Myanmar (Inclusive Development International, 2023). Meskipun Beijing tidak secara langsung terkena dampak sanksi ini, perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di Myanmar menghadapi tekanan bisnis dan risiko reputasi yang semakin besar.

Dalam menghadapi dinamika ini, China mulai mengambil pendekatan yang lebih hati-hati terhadap Myanmar. Pada Agustus 2024, China kembali melakukan pendekatan diplomatik dengan semua pihak di Myanmar. Pemerintah China mengadakan pertemuan dengan pemerintahan bayangan National Unity Government (NUG) untuk membahas kemungkinan peran China dalam proses perdamaian dan stabilitas Myanmar. Meskipun Beijing secara resmi tidak mengakui NUG, pertemuan ini menunjukkan bahwa China mulai mempertimbangkan opsi lain di luar junta militer untuk menjaga kepentingannya dalam jangka panjang (Stimson Center, 2024).

Di satu sisi, junta militer Myanmar terus berupaya mempertahankan investasi China untuk memperkuat posisinya. Pada September 2024, junta mengumumkan rencana percepatan pembangunan proyek Zona Ekonomi Khusus Kyaukpyu, dengan dukungan dana dari China. Namun, proyek ini menghadapi hambatan besar karena masih adanya perlawanan bersenjata dari kelompok oposisi serta tekanan internasional yang terus meningkat.

Namun di sisi lain, kelompok Three Brotherhood Alliance (TBA) berhasil merebut beberapa wilayah strategis di perbatasan China-Myanmar. Hal ini menciptakan ketidakpastian besar bagi proyek-proyek investasi China, terutama yang berada di daerah yang dikuasai oleh kelompok etnis bersenjata. Akibatnya, beberapa perusahaan China mulai mempertimbangkan untuk mengurangi skala investasi mereka di Myanmar.

Secara keseluruhan, keterlibatan China di Myanmar mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Beijing dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, geopolitik, dan stabilitas regional. Meskipun Myanmar merupakan bagian penting dari Belt and Road Initiative (BRI), eskalasi konflik telah membuat proyek-proyek China di negara tersebut semakin rentan.

Dengan meningkatnya tekanan dari kelompok oposisi, masyarakat internasional, dan resiko konflik bersenjata yang terus berlangsung, China harus menavigasi hubungan dengan berbagai aktor di Myanmar secara lebih hati-hati. Dalam beberapa tahun ke depan, kebijakan China terhadap Myanmar kemungkinan akan menjadi indikator penting dalam melihat bagaimana Beijing menangani hubungan dengan negara-negara mitra dalam situasi konflik berkepanjangan.

China juga menghadapi dilema antara mendukung junta untuk stabilitas jangka pendek atau mendukung dialog inklusif demi hubungan jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Keputusan Beijing dalam beberapa tahun ke depan akan sangat menentukan nasib proyek-proyek BRI di Myanmar serta pengaruh geopolitiknya di Asia Tenggara.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keterlibatan China dalam bisnis di Myanmar, khususnya melalui proyek CMEC, berkontribusi terhadap dinamika politik dan konflik yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis geopolitik, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana risiko eskalasi konflik mempengaruhi kepentingan China serta bagaimana Beijing menavigasi hubungan dengan berbagai aktor di Myanmar dalam situasi yang semakin tidak stabil.

KERANGKA TEORI

Dalam menganalisis hubungan Tiongkok-Myanmar pasca-kudeta 2021, pendekatan Neorealisme digunakan sebagai dasar teoretis untuk memahami bagaimana struktur sistem internasional yang anarkis membentuk perilaku negara dalam dinamika bilateral mereka. Neorealisme, yang dipelopori oleh Kenneth Waltz dalam Theory of International Politics (1979), menekankan bahwa negara bertindak dalam sistem internasional tanpa otoritas tertinggi, sehingga setiap negara harus mengandalkan kapabilitas sendiri untuk bertahan hidup dan mengamankan kepentingan strategisnya (Waltz, 1979).

Kerangka teori dalam penelitian ini mengacu pada dua varian utama Neorealisme, yaitu Defensive Realism dan Offensive Realism, yang masing-masing memiliki kontribusi dalam menjelaskan motif dan strategi dominasi Tiongkok terhadap Myanmar, khususnya melalui skema China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) setelah kudeta.

Defensive Realism: Stabilitas sebagai Tujuan Utama

Menurut Kenneth Waltz, aktor negara secara rasional cenderung menghindari konflik terbuka dan lebih memilih tindakan defensif untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan dan stabilitas lingkungan strategisnya (Waltz, 1979). Dalam konteks ini, dominasi Tiongkok atas Myanmar dapat dilihat sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan perbatasan, khususnya provinsi Yunnan yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Instabilitas di Myanmar, seperti konflik antara kelompok etnis bersenjata atau gelombang pengungsi, berpotensi mengancam keamanan domestik Tiongkok (Sun, 2021).

Tiongkok mempertahankan hubungan dengan aktor non-negara seperti United Wa State Army (UWSA) dan Kachin Independence Army (KIA), sebagai bentuk diplomasi asimetris untuk mengendalikan eskalasi konflik (Mohan & Zhang, 2022). Pendekatan ini memungkinkan Tiongkok memainkan peran penyeimbang tanpa harus terlibat langsung dalam dinamika internal Myanmar.

Meskipun tidak secara eksplisit mendukung junta militer, Tiongkok tetap menjalin komunikasi pragmatis demi memastikan kelangsungan proyek-proyek vital seperti CMEC. Dengan demikian, dominasi Tiongkok bersifat defensif dalam rangka mencegah instabilitas yang bisa mengganggu kepentingan jangka panjangnya di wilayah tersebut (Maung, 2021).

Offensive Realism: Ekspansi sebagai Strategi Dominasi

Berbeda dengan pendekatan defensif, Offensive Realism yang dikembangkan oleh John Mearsheimer menekankan bahwa negara akan secara aktif mencari peluang untuk meningkatkan kekuatan relatifnya guna menguasai wilayah strategis sebanyak mungkin dalam sistem internasional yang kompetitif (Mearsheimer, 2001).

Dalam konteks ini, dominasi Tiongkok terhadap Myanmar pasca-kudeta mencerminkan ambisi ekspansionis Tiongkok melalui jalur ekonomi dan geopolitik. Melalui CMEC sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI), Tiongkok mendapatkan akses langsung ke Samudra Hindia melalui pelabuhan Kyaukpyu, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap Selat Malaka, yang rawan terhadap kontrol kekuatan rival seperti Amerika Serikat dan India (Zhao, 2022).

Investasi Tiongkok dalam infrastruktur strategis seperti jalur pipa minyak dan gas tetap berlanjut meskipun Myanmar berada dalam situasi krisis, menunjukkan bahwa keuntungan strategis lebih diutamakan dibanding stabilitas internal Myanmar (Chan, 2021). Lebih dari itu, Myanmar juga menjadi arena persaingan geopolitik antara Tiongkok dengan AS dan India, yang secara aktif memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Dominasi Tiongkok di Myanmar dapat dibaca sebagai langkah ofensif untuk membendung pengaruh kekuatan besar lainnya (Rajagopalan, 2022).

Dengan demikian, kerangka Neorealisme, baik varian defensif maupun ofensif memberikan lensa yang tajam untuk melihat dinamika kekuatan antara Tiongkok dan Myanmar dalam konteks regional dan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji dinamika dominasi Tiongkok terhadap Myanmar pasca-kudeta militer 2021, melalui lensa teori Neorealisme. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap kompleksitas relasi antarnegara secara mendalam dalam konteks geopolitik regional yang terus berkembang.

Sebagaimana dinyatakan oleh Yin (2018), studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena kontemporer secara intensif dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan lingkungannya tidak tegas. Dalam hal ini, proyek China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) diposisikan sebagai studi kasus utama untuk menelaah bagaimana Tiongkok memanfaatkan instrumen ekonomi dalam strategi geopolitiknya di Asia Tenggara.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen (document analysis), yakni metode sistematis dalam menelaah dan menginterpretasikan dokumen tertulis guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian (Bowen, 2009). Sumber data meliputi dokumen kebijakan luar negeri Tiongkok, laporan resmi pemerintah Myanmar, publikasi dari lembaga kajian strategis (think tanks), artikel akademik, serta berita dari media nasional dan internasional yang kredibel dan relevan.

Secara teoritis, penelitian ini berpijak pada kerangka Neorealisme yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional yang anarkis, serta menekankan pentingnya struktur sistem global dalam menentukan perilaku negara (Waltz, 1979). Dominasi Tiongkok di Myanmar melalui CMEC dianalisis sebagai bagian dari upaya strategis dalam mempertahankan serta memperluas pengaruh regional, sejalan dengan prinsip keseimbangan kekuatan (balance of power).

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai sumber informasi guna memastikan konsistensi dan validitas temuan.

HASIL PENELITIAN

Penguatan Posisi Strategis Tiongkok melalui Proyek CMEC di Myanmar

Setelah kudeta militer 1 Februari 2021, Myanmar mengalami tekanan internasional yang signifikan, termasuk sanksi dari negara-negara Barat dan penangguhan keanggotaannya di berbagai forum regional. Di tengah keterasingan global ini, Tiongkok tampil sebagai aktor eksternal yang tetap mempertahankan hubungan bilateralnya dengan Myanmar. Salah satu instrumen utama yang digunakan Tiongkok untuk mempertahankan sekaligus memperluas pengaruhnya adalah China-Myanmar Economic Corridor (CMEC), bagian dari mega-proyek

Belt and Road Initiative (BRI) yang secara strategis menghubungkan Yunnan dengan Laut Andaman melalui pelabuhan Kyaukpyu (Liao, 2022; Maung & Tun, 2021).

Temuan menunjukkan bahwa sejak kudeta, Tiongkok memperkuat pendekatan diplomatik dan ekonominya kepada pemerintah militer Myanmar melalui intensifikasi proyek CMEC. Laporan dari International Crisis Group (2022) menyebutkan bahwa sejumlah kesepakatan baru dan proyek yang sebelumnya tertunda kembali dijalankan dengan kecepatan tinggi, antara lain pembangunan rel kereta, kawasan industri, dan pelabuhan.

Lebih jauh, CMEC tidak hanya berfungsi sebagai proyek infrastruktur, namun juga sebagai alat Tiongkok untuk mengamankan jalur pasokan energinya dan memperluas konektivitas maritim strategis ke Samudra Hindia. Dengan demikian, proyek ini memperkuat posisi Tiongkok dalam percaturan geopolitik kawasan, menjadikan Myanmar sebagai mitra penting dalam konteks persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik

Ketegangan Sosial dan Politik Lokal dalam Implementasi CMEC

Di balik narasi kerja sama ekonomi yang menguat, implementasi CMEC di tingkat lokal memunculkan sejumlah friksi sosial dan politik yang tidak dapat diabaikan. Banyak dari proyek yang berjalan pasca-kudeta berlokasi di wilayah yang sensitif secara etnis dan historis rawan konflik, seperti Negara Bagian Rakhine dan Shan. Kelompok masyarakat sipil dan organisasi lokal melaporkan adanya penggusuran, pelanggaran hak atas tanah, serta keterlibatan militer dalam mengamankan zona pembangunan tanpa proses konsultasi yang transparan (Smith & Kyaw, 2023).

Setelah kudeta, ruang kebebasan sipil menyempit secara drastis. Protes terhadap proyek-proyek besar seperti CMEC sulit dilakukan karena meningkatnya kontrol junta terhadap media dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah militer memanfaatkan narasi pembangunan untuk meredam kritik, bahkan menjadikan proyek-proyek BRI sebagai indikator keberhasilan stabilitas nasional (Thompson, 2022).

Selain itu, indikasi keterlibatan langsung aktor-aktor keamanan Tiongkok dalam pengamanan proyek strategis di sepanjang jalur CMEC juga menjadi perhatian. Lin (2022) mencatat bahwa dalam beberapa titik pengembangan, terdapat penggunaan teknologi pengawasan dan kemungkinan kehadiran pasukan pendukung logistik asing. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait kedaulatan dan ruang negosiasi Myanmar dalam kerja sama bilateral tersebut.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa di balik peran CMEC sebagai instrumen pembangunan, terdapat dinamika kekuasaan yang berlapis. Proyek ini tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperdalam ketergantungan politik Myanmar terhadap Tiongkok dan memperbesar potensi ketegangan sosial di wilayah proyek.

PEMBAHASAN

Strategi Tiongkok sebagai Negara Adidaya dalam Sistem Internasional yang Anarkis

Neorealisme menekankan bahwa sistem internasional bersifat anarkis, sehingga tidak ada otoritas tertinggi yang mampu mengatur perilaku negara secara mutlak. Dalam situasi ini, negara bertindak rasional demi mempertahankan eksistensinya dan memperkuat kekuatan relatifnya (Waltz, 1979). Dalam konteks Myanmar pasca-kudeta 2021, Tiongkok memanfaatkan ketidakstabilan domestik dan keterasingan internasional Myanmar untuk memperkuat posisi geopolitiknya melalui jalur China-Myanmar Economic Corridor (CMEC).

Tindakan Tiongkok mempercepat implementasi proyek-proyek strategis pasca-kudeta menunjukkan kecenderungan negara besar untuk mengisi kekosongan kekuasaan di kawasan yang rentan secara politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Mearsheimer (2001) bahwa

negara besar akan selalu mencari cara untuk memperluas pengaruh dan menciptakan zona dominasi demi menjamin keamanannya sendiri. Dalam konteks ini, CMEC menjadi alat penting bagi Tiongkok untuk mengakses Samudra Hindia, mengamankan jalur energi, serta mengimbangi pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Indo-Pasifik.

Pendekatan Tiongkok terhadap Myanmar merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip Neorealisme: bertindak dalam batasan sistem internasional yang anarkis, mengejar kepentingan strategis, dan mempertahankan posisi dominan melalui diplomasi ekonomi yang agresif.

Kerangka Neorealisme memberikan kontribusi penting dalam membaca dinamika hubungan Tiongkok–Myanmar pasca-kudeta 2021. Dalam perspektif Defensive Realism, dominasi Tiongkok lebih dimaknai sebagai upaya mempertahankan status quo regional guna menghindari ketidakstabilan yang dapat mengancam kepentingan domestik. Ketergantungan terhadap stabilitas kawasan, terutama di wilayah perbatasan seperti Yunnan, mendorong Tiongkok untuk menjalin komunikasi dengan aktor-aktor non-negara di Myanmar dan menghindari keterlibatan militer langsung (Sun, 2021). Dalam konteks ini, dominasi bersifat kalkulatif, terfokus pada pencegahan disrupsi atas proyek strategis seperti CMEC.

Di sisi lain, pendekatan Offensive Realism membuka ruang pemaknaan bahwa keterlibatan Tiongkok bukan hanya bentuk reaksi terhadap instabilitas, melainkan bagian dari strategi ekspansi kekuasaan di tengah kompetisi global. Melalui kontrol atas jalur energi, investasi infrastruktur, dan penguatan diplomasi ekonomi, Beijing menunjukkan ambisi untuk mengkonsolidasikan pengaruh jangka panjang di Asia Tenggara, sekaligus menahan penetrasi kekuatan lain seperti Amerika Serikat dan India (Zhao, 2022).

Oleh karena itu, refleksi terhadap kedua varian Neorealisme ini menunjukkan bahwa dominasi Tiongkok di Myanmar bukan semata-mata respons terhadap tantangan eksternal, melainkan bagian dari desain geopolitik yang lebih besar. Analisis ini memperjelas bahwa strategi Beijing bersifat adaptif, menggabungkan kalkulasi defensif dan dorongan ofensif dalam satu kerangka kebijakan luar negeri yang kohesif dan strategis.

Myanmar sebagai Aktor Rasional dalam Menghadapi Tekanan Sistem Internasional

Dari sudut pandang Neorealisme, negara seperti Myanmar juga tetap merupakan aktor rasional yang berupaya mempertahankan eksistensinya dalam sistem global yang tidak bersahabat. Kudeta militer 2021 mengakibatkan tekanan internasional, sanksi ekonomi, dan pengucilan diplomatik yang luas. Dalam kondisi tersebut, Myanmar memperkuat hubungan dengan Tiongkok sebagai upaya untuk bertahan hidup di tengah isolasi (Grieco, 1997).

Kerja sama yang semakin erat dengan Tiongkok, khususnya dalam proyek CMEC, bukan semata-mata pilihan ekonomi, melainkan strategi politik untuk mencari legitimasi eksternal dan dukungan kekuatan besar. Menurut Waltz (1979), negara dalam posisi lemah akan mencari penyeimbang (balancer) atau pelindung (protector) guna mempertahankan status quo atau menghindari tekanan sistemik. Dalam hal ini, Myanmar melihat Tiongkok sebagai satu-satunya aktor besar yang bersedia berhubungan tanpa mensyaratkan norma demokrasi atau HAM.

Oleh karena itu, kolaborasi erat Myanmar–Tiongkok pasca-kudeta dapat dibaca sebagai hasil dari kalkulasi rasional yang sejalan dengan asumsi dasar Neorealisme: negara bertindak untuk bertahan hidup, sekalipun itu berarti semakin masuk ke dalam orbit pengaruh negara besar.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi Tiongkok di Myanmar pasca-kudeta 2021 tidak dapat dilepaskan dari kepentingan strategis Tiongkok dalam memperluas pengaruh

geopolitiknya di kawasan Asia Tenggara. Melalui proyek China-Myanmar Economic Corridor (CMEC), Tiongkok secara aktif memperkuat akses terhadap Samudra Hindia, sekaligus mengamankan jalur logistik dan energi sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road Initiative (BRI). Situasi krisis politik dan isolasi internasional yang dialami Myanmar menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk memperdalam keterlibatan ekonominya, sekaligus menanamkan pengaruh politik jangka panjang.

Dari perspektif Neorealisme, tindakan Tiongkok mencerminkan strategi negara besar dalam sistem internasional yang anarkis: memanfaatkan instabilitas regional untuk memperkuat kekuatan relatif. Sementara itu, Myanmar sebagai aktor rasional juga menjalankan strategi bertahan (survival strategy) dengan mendekat pada kekuatan besar yang tidak mensyaratkan norma liberal. CMEC tidak hanya menjadi koridor ekonomi, tetapi juga simbol ketergantungan strategis Myanmar terhadap Tiongkok dalam menghadapi tekanan internasional.

Dengan demikian, hubungan Tiongkok dan Myanmar dalam konteks CMEC pasca-kudeta merupakan perwujudan dari logika kekuasaan dalam kerangka Neorealisme, di mana kepentingan strategis negara lebih diutamakan dibandingkan norma dan nilai.

DAFTAR PUSTAKA

BBC News Indonesia. (2021). Kudeta militer Myanmar: Siapa Jenderal Min Aung Hlaing dan apa ambisinya? https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55914467

Bicker, L. (2024, September 27). Konflik di Myanmar yang menghalangi proyek ambisius China, Jalur Sutra Baru. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y50zkk5geo

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Chan, L. (2021). China's Strategic Calculations in Myanmar Post-Coup. Journal of Asian Geopolitics, 14(2), 99–112.

Erina, R. (2021). Sejumlah pabrik milik China di Myanmar jadi sasaran pengrusakan dan pembakaran, diduga ada sentimen anti-China. RMOL.id. https://rmol.id/dunia/read/2021/03/15/478862/sejumlah-pabrik-milik-china-di-myanmar-jadi-sasaran-pengrusakan-dan-pembakaran-diduga-ada-sentimen-anti-china

Htut, C. M. (2024). Opportunities, challenges, and countermeasures of China–Myanmar economic and trade cooperation under the background of RCEP. Open Journal of Applied Sciences, 14(4), Artikel 66. https://doi.org/10.4236/ojapps.2024.144066

Inclusive Development International. (2023, Mei). China Global Newsletter: Chinese Investment in Myanmar After the Coup (Edisi ke-8). https://www.inclusivedevelopment.net/china-global-program/china-global-newsletter-edition-8/

International Crisis Group. (2021). The cost of the coup: Myanmar edges toward state collapse. Crisis Group Asia Briefing No. 167. Retrieved from https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/b167-cost-coup-myanmar-edges-toward-state-collapse

Kobayashi, Y., & King, J. (2022). Myanmar's strategy in the China–Myanmar Economic Corridor: A failure in hedging? International Affairs, 98(3), 1013–1032. https://doi.org/10.1093/ia/iiac049

Maung, M. (2021). Beijing's Balancing Act: China's Response to the Myanmar Coup. Southeast Asian Affairs, 2021, 229–244.

Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. W. W. Norton & Company.
Mohan, C. R., & Zhang, Y. (2022). Ethnic Militias and Regional Stability: China's Role in Northern Myanmar. Asian Security Review, 18(1), 51–70.
Rajagopalan, R. (2022). China-India Rivalry in Myanmar and the Bay of Bengal. Strategic Analysis, 46(3), 295–310.
Ramachandran, S. (2023). China's Collaboration with the Myanmar Junta: A Case of Strategic Hedging? The Jamestown Foundation. https://jamestown.org/program/chinas-collaboration-with-the-myanmar-junta-a-case-of-strategic-hedging/
Selth, A. (2022). Myanmar's military and China: A longstanding but complex relationship. East Asia Forum. Retrieved from https://www.eastasiaforum.org/2022/04/14/myanmars-military-and-china/
Simangunsong, R. A. H. (2024). Respons strategis Myanmar terhadap Cina: Analisis hedging 2014-2018. Economic Military and Geographically Business Review, 1(2), 17-30. https://doi.org/10.61511/emagrap.v1i2.2024.279
Stimson Center. (2024). China in Myanmar: How the Game-Changing Neighbor Would Continue to Maintain Its Influence. https://www.stimson.org/2024/china-in-myanmar-how-the-game-changing-neighbor-would-continue-to-maintain-its-influence/
Sun, Y. (2021). China's balancing act in Myanmar. The Brookings Institution. Retrieved from https://www.brookings.edu/articles/chinas-balancing-act-in-myanmar/
Sun, Y. (2021). China's Strategic Recalibration in Post-Coup Myanmar. Brookings Institution Report. https://www.brookings.edu
Tempo.co. (2021). Pengadilan militer Myanmar hukum 28 orang yang dituduh bakar pabrik Cina. https://www.tempo.co/internasional/pengadilan-militer-myanmar-hukum-28-orang-yang-dituduh-bakar-pabrik-cina-509289
Tun, T. (2023). Chinese-backed projects in post-coup Myanmar: Between opportunity and exploitation. Asia Pacific Issues, (157), 1–10.
VOA Indonesia. (2020). China-Myanmar sepakati puluhan perjanjian infrastruktur.https://www.voaindonesia.com/a/china-myanmar-sepakati-puluhan-perjanjian-infrastruktur-/5251378.html
Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. Addison-Wesley.
Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. McGraw-Hill.
Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.
Zhao, S. (2022). Belt and Road in Crisis Zones: CMEC and China's Risk Appetite in Myanmar. Journal of Contemporary China, 31(135), 412–430.
Zhao, S. (2022). China's strategic interests in Myanmar and the limits of its influence. Journal of Contemporary China, 31(133), 1–16. https://doi.org/10.1080/10670564.2021.2000319
Zhou, L. (2021). How China's Belt and Road is adapting to Myanmar's post-coup reality. South China Morning Post. Retrieved from https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3123945/